

ALIANSI KERAJAAN SUNDA PAJAJARAN DENGAN PORTUGIS TAHUN 1522 M

Muhamad Nandang Sunandar^{1*}, Ukhti Nuril Fathi²

Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani No.30 Curug, Serang-Banten

*Email: nandang.sunandar@uinbanten.ac.id

Abstract: *The discussion regarding the alliance between the Sunda Pajajaran Kingdom and the Portuguese aims to examine further the form of cooperation carried out between the Sunda Pajajaran Kingdom and the Portuguese. The background to this lie was the concern of the Sunda King of Pajajaran over Islamic political forces whose area of authority was in the Demak Sultanate. To anticipate the weakening of the existence of the Sunda Pajajaran Kingdom, an agreement was made between the Sunda Pajajaran Kingdom and the Portuguese, one of the aims of which was to threaten Islamic political power in the Demak Sultanate. The alliance between the Sunda Kingdom of Pajajaran and the Portuguese occurred on August 21, 1522 AD. This agreement was formalized by making a written agreement signed by both parties. Apart from the written agreement, the Portuguese also erected a large stone called Padrao which was located on the eastern edge of the mouth of the Ciliwung River. This agreement caused strong reactions from various Islamic kingdoms in the archipelago who did not like the existence of the Portuguese. Therefore, various Islamic kingdoms in the archipelago who did not like the existence of the Portuguese formed a joint fleet to fight against the Portuguese.*

Keywords: *Sunda Pajajaran Kingdom, Agreement, Resistance*

Abstrak: Pembahasan mengenai aliansi Kerajaan Sunda Pajajaran dan Portugis bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk jalinan kerjasama yang dilakukan antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis. Adanya aliansi ini dilatar belakangi karena kekhawatiran Raja Sunda Pajajaran atas kekuatan politik Islam yang wilayah otoritasnya di Kesultanan Demak. Untuk mengantisipasi melemahnya eksistensi Kerajaan Sunda Pajajaran, maka dibuat kesepakatan antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis yang salah satu tujuannya yaitu ingin melemahkan kekuatan politik Islam di Kesultanan Demak. Aliansi antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 M. Perjanjian ini diresmikan dengan dibuatnya perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain perjanjian tertulis, dari pihak Portugis juga memancangkan sebuah batu besar yang disebut dengan Padrao yang letaknya berada ditepi sebelah Timur muara Sungai Ciliwung. Perjanjian ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak kerajaan Islam di Nusantara yang tidak menyukai keberadaan bangsa Portugis. Oleh karena itu dari berbagai pihak kerajaan Islam di Nusantara yang tidak menyukai keberadaan bangsa Portugis membentuk sebuah armada gabungan untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis.

Kata Kunci: *Kerajaan Sunda Pajajaran, Perjanjian, Perlawanan*

PENDAHULUAN

Akhir abad ke-15 M merupakan masa petualangan orang-orang Eropa. Penemuan-penemuan baru berupa alat-alat perlengkapan kapal mendorong para pelayar Eropa untuk melakukan pelayaran yang bersifat petualangan. Pembentukan negara-negara baru di Benua Eropa memupuk pertumbuhan semangat nasionalisme, ditambah lagi sebagian besar Bangsa Eropa pada masa itu tengah antusias akan keberadaan agama Kristen. Semangat untuk menyiarkan agama Kristen di antara bangsa-bangsa yang belum mengenalnya dipandang sebagai sebuah tugas utama bagi tiap umat Kristiani sebagaimana anjuran paus di Roma, terutama penundukan negara-negara Islam di bagian Timur (Muljana, 2005).

Negara di bagian Timur merupakan salah satu pemasok rempah-rempah yang diperdagangkan di Eropa oleh beragam pedagang dengan harga yang sangat tinggi. Para pedagang Eropa ingin mengetahui dari mana rempah-rempah tersebut berasal, dan bagaimana menemukan jalan untuk mengunjungi negara rempah-rempah itu. Jika jalan ke negara rempah-rempah berhasil dirintis; para pedagang Eropa dapat mengambil rempah-rempah itu sendiri di negara asalnya tanpa harus melalui perantara. Sejak tahun 1488 M para pelayar Portugis telah memulai ekspedisipelayarannya. Wilayah pertama yang menjadi tujuan ekspedisi para pelayar Portugis ialah Tanjung Harapan di ujung selatan Benua Afrika. Penemuan Tanjung Harapan, membuka peluang untuk mengadakan pelayaran ke negara-negara disebelah timur melalui pantai Timur Afrika (Muljana, 2005).

Aliansi merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukakan oleh dua negara atau lebih untuk saling membantu dalam sebuah keadaan tertentu yang telah ditetapkan. Aliansi juga merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah negara. Baik itu negara kuat maupun lemah, keduanya sama-sama butuh untuk beraliansi (Syafiqa, 2016).

Tujuan awal Portugis yang semula hanya ingin mencari negara asal rempah-rempah untuk memperoleh keuntungan dagang, namun bangsa Portugis lambat laun semakin menjadi-jadi. Ketika kedudukan orang-orang Portugis semakin bertambah kuat, menjadikan tujuan pelayaran bangsa Portugis bukan lagi murni untuk

berdagang mencari keuntungan, melainkan ekspansi politik dan keagamaan (Muljana, 2005).

Periode awal abad ke-16 M di sisi lain menjadi kemunculan sebuah peristiwa baru dalam dunia sejarah di Pulau Jawa. Hal tersebut disebabkan oleh timbulnya dua fenomena yang cukup menarik, yaitu melemahnya kerajaan-kerajaan lama di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha, dan kemunculan Islam sebagai sebuah agama sekaligus kekuatan politik baru yang terus menunjukkan pengaruh yang kian membesar (Kartodirjo, 1992).

Menurut berita dari Tome Pires, golongan para pedagang Islam saat itu dipandang sangat terhormat, karena para pedagang Islam yang semula hanya dari golongan menengah dan bangsa asing, lambat laun dapat mengubah cara hidup hingga menjadi kesatria golongan bangsawan, dan kemudian mendapatkan hak memiliki tanah (De Graaf dan Pigeaud, 2003).

Agama Islam mulai masuk dan berkembang pesat di Samudera Pasai juga Malaka, sehingga penduduk Majapahit yang tinggal dipesisir banyak terpengaruh dan beralih agama. Banyaknya penduduk lokal di pesisir pantai yang memeluk Islam berakibat pada tumbuhnya perkampungan pendatang dan perkampungan Islam. Adanya perkampungan para pendatang orang-orang Islam tanpa disadari dapat melumpuhkan sektor perekonomian di Majapahit (Abdullah, 2020).

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh sekitar abad ke-15 M, banyak rakyat dari kerajaan Majapahit memutuskan untuk berpindah ke ibukota Kawi, Galuh. Kedatangan penduduk Kerajaan Majapahit disambut dengan baik, bahkan kerabat Raja Majapahit dijodohkan dengan salah satu putri dari raja Kerajaan Galuh. Keadaan itu mengundang kemarahan Raja Susuktunggal selaku Raja Sunda, sebab dalam Kerajaan Sunda-Galuh telah menyepakati bahwa masyarakat Sunda tidak boleh menikah dengan masyarakat Kerajaan Majapahit. Peleanggaran yang dilakukan oleh Raja Dewa Niskala membuat Raja Susuktunggal semakin geram. Agar tidak terjadinya konflik akhirnya kedua dewan penasihat kerajaan membuat kesepakatan untuk berdamai dan melakukan pengangkatan penguasa yang baru yakni Jayadewata atau yang dikenal dengan Sri Baduga Maharaja sebagai pemimpin Kerajaan Sunda yang baru dimana pusat pemerintahannya berada di Pajajaran (El-Jaquene, 2020).

Sumber seperti *Pararaton* dan *Nagarakertagama* menyebutkan bahwa sebelum

abad ke-14 M, Kerajaan Sunda bukan Pajajaran di Jawa bagian Barat. Pada abad ke-16 M dan seterusnya barulah penyebutan nama Pajajaran mulai ditemukan dan mulai dikenal dalam prasasti dan naskah klasik seperti *Carita Parahiyangan*. Kemudian nama Pajajaran semakin terkenal setelah ditemukan pantun-pantun Sunda serta babad-babad yang tertulis ketika Pajajaran sudah runtuh (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

Jalinan kerjasama antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan bangsa Portugis berawal dari kekhawatiran akan eksistensi kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran yang mulai meredup di Nusantara. Bagi Kerajaan Sunda Pajajaran, keberadaan Islam yang cepat berkembang pesat dianggap sebagai sebuah ancaman, terlebih lagi Islam semakin mendominasi menjadi sebuah kekuatan politik (Zakaria, 2011).

Keberhasilan Portugis menguasai Malaka menjadikan rute pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara mulai berubah. Perubahan rute ini menjadikan Banten dan Sunda Kalapa menjadi daerah yang sangat diperhitungkan. Oleh karena itu Portugis juga mulai melirik Kerajaan Sunda Pajajaran untuk dijadikan sebagai sekutunya dengan tujuan menguasai Selat Sunda (Abdullah, 2020).

Pihak Kerajaan Sunda Pajajaran dan Portugis menyepakati untuk melakukan konsolidasi dibidang perdagangan dan keamanan. Dalam salah satu isi perjanjian, pihak Kerajaan Sunda Pajajaran dan Portugis juga menyepakati untuk mendirikan *loji* Portugis di Banten. Pada kenyataannya pihak Kerajaan Sunda Pajajaran dan Portugis memilih Pelabuhan Kalapa sebagai tempat untuk mendirikan *loji*. Portugis. Perjanjian antara Portugis dengan Kerajaan Sunda Pajajaran ditandatangani langsung oleh Ratu Samiam (Prabu Surawisesa) sebagai perwakilan dari Pajajaran dan Henrique De Leme sebagai perwakilan Portugis (Lubis, 2003).

Meskipun isi dari perjanjian Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis tidak sepenuhnya terealisasi, akan tetapi perjanjian persahabatan antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis sudah berhasil terjalin. Sebagai bukti untuk memperingati dan mengukuhkan perjanjian antara keduanya, ketika Henrique De Leme tiba di “Pelabuhan Sunda” yang disebut Calapa, dibuatlah sebuah tugu dari batu yang

disebut *Padrao* di tempat benteng Portugis akan dibangun (Guillot, 2008).

Sebagai kota pelabuhan dan pangkalan yang sangat strategis di Jawa Barat, Banten merupakan akses dan aset yang sangat berarti bagi Kerajaan Sunda Pajajaran. Dengan menguasai Banten, berarti salah satu sumber daya dan sumber pemasukan Kerajaan Pajajaran sudah dikuasai. Penaklukan wilayah Banten dipimpin oleh Sunan Gunung Jati beserta sejumlah pasukan perang Kesultanan Demak sekitar tahun 1524-1525 M. Setelah berhasil menguasai Banten, Kesultanan Demak juga berhasil mengislamkan Jawa Barat dan mulai melakukan ekspedisi kepelabuhan Kalapa. Dengan bersatunya pasukan Banten dan Demak, ditambah dengan bantuan pasukan dari Cirebon, mengakibatkan Kerajaan Sunda Pajajaran mengalami kekalahansehingga pelabuhan Kalapa dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan gabungan dari Cirebon, Banten dan Demak (Zakaria, 2011).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, bentuk aliansi Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis menjadi sebuah topik yangpeneliti angkat sebagai sebuah pembahasan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk aliansi yang terjalin dan apa pengaruhnya bagi keberlangsungan kekuasaan Kesultanan Demak yang saat itu menjadi wilayah otoritas Islam di Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitoian ini menggunakan bentuk penelitian historis yang dimana diarahkan untuk mengkaji, mengungkap, menggambarkan serta menjelaskan peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Sebagai sebuah penulisan sejarah yang perlu dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan beberapa tahap kerja sejarah dengan melakukan tahap-tahap dalam metode penelitian sejarah yang dibuat secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian sejarah pada umumnya, yaitu tahap heuristik, tahap verifikasi, tahap interpretasi, dan tahap historiografi.

1. Tahap Heuristik

Tahapan pengumpulan sumber atau yang biasa disebut dengan tahap heuristik. Heuristik dalam bahasa Yunani disebut juga *Heureskein* yang berarti menemukan. Tahap heuristik merupakan teknik atau cara untuk menemukan sumber yang bisa didapat melalui studi kepustakaan, pengamatan secara langsung di lapangan, atau melalui interview. Saat

ini data sejarah bisa didapat dari berbagai macam cara selain studi pustaka. Sumber sejarah dapat juga diakses melalui media cetak maupun elektronik. (Sunandar, 2021).

Dalam tahap heuristik, sumber sejarah dapat diperoleh melalui bukti yang ditinggalkan manusia dimasa lampau baik dalam bentuk peninggalan maupun catatan. Sumber-sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi sumber tulisan, sumber lisan dan benda. Sumber tulisan terbagi menjadi dua, yakni sumber *primer* dan sumber *sekunder*. Dalam penelitian ini menggunakan sumber *primer* dan juga sumber *sekunder*, serta dilengkapi dengan sumber benda sebagai sumber tambahan. (Hamid dan Madjid, 2011).

2. Tahap Verifikasi

Tahap verifikasi atau kritik sumber merupakan proses pengujian melalui serangkaian kritik. Tahap verifikasi dibutuhkan untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. Sebelum digunakan, sumber-sumber tulisan yang telah dikumpulkan peneliti perlu melalui tahap verifikasi yang meliputi dua aspek yaitu: kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keabsahan atau keaslian suatu sumber sejarah. (Madjid dan Wahyudi, 2014).

Sedangkan kritik intern diperlukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sebuah sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah. Selain itu, kepentingan subjektivitas sumber serta ketersediaan sumber untuk mengungkapkan kebenaran serta konsistensi sumber terhadap isinya (Madjid dan Wahyudi, 2014).

3. Tahap Interpretasi

Tahap lanjutan setelah fakta-fakta sejarah berhasil dikumpulkan, fakta sejarah tersebut terlebih dahulu digabungkan berdasarkan pada subjek kajian. Dalam hal ini tema pokok kajian merupakan indikasi yang dijadikan sebagai kriteria dalam menggabungkan data sejarah. Data yang tidak penting atau yang tidak berkaitan dengan tema studi kemudian dipisahkan, agar tidak mengganggu peneliti dalam merekonstruksi peristiwa sejarah (Hamid dan Madjid, 2011).

Tahapan ini biasa disebut dengan interpretasi. Interpretasi sendiri adalah proses menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta

tersebut menjadi perpaduan yang selaras dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Penafsiran fakta harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa, sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lainnya dapat disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang rasional (Laksono, 2018).

Adapun analisis dan sintesis dipandang sebagai metode utama dalam Interpretasi. Interpretasi juga merupakan sebuah tahapan yang cukup sulit karena penulis harus bersikap netral terhadap sumber yang ada. Oleh karena itu, penulis harus mengambil jarak dengan sumber agar tidak terlalu dekat dan menimbulkan bias (Sunandar, 2021).

4. Tahap Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurrahman, 1999). Menulis sejarah bukan sekedar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian (Laksono, 2018).

Tujuan dari historiografi sendiri ialah agar fakta-fakta sejarah yang sudah benar-benar terpilih tetap masih bersifat fragmentaris yang dapat menjadi satu sajian yang bersifat utuh, komunikatif dan sistematis. Sehingga menjadi sebuah karya sejarah yang memberikan nuansa baru dan mudah dimengerti (Rachmat, 2009). Sehingga tidak sekedar bercerita tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dengan tinjauan berbagai aspek. Penulisan yang baik adalah gabungan antar unsur naratif, deskriptif, dan analitis. Bentuk gabungan ini akan menampilkan unsur cerita, detail sumber dan analisa terhadap peristiwa sejarah (Sunandar, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kerajaan Sunda Pajajaran

Pada buku Saleh Danasasmita dengan judul “Mencari Gerbang Pakuan” mengutip pendapat Karel Frederik Holle dalam tulisannya yang berjudul “*De Batoe Toelis te Buitenzorg*” (Batutulis di Bogor). K.F. Holle menunjukkan bahwa di dekat kota Bogor terdapat kampung dan sungai yang bernama Cipaku. Disana banyak ditemukan pohon paku haji, sehingga dari fakta tersebut K.F. Holle menduga bahwa nama Pakuan mempunyai hubungan

asal-usul yang menyangkut kehadiran Cipaku dan pohon paku. Menurutnya nama Pakuan Pajajaran berarti “Pohon paku yang berjajar” (Danasasmita, 2014).

Mengutip pendapat Gerret Pieter Rouffaer dalam buku karya Saleh Danasasmita berjudul “Melacak Sejarah Pakuan dan Prabu Siliwangi”, yang mengemukakan teori mengenai Pakuan Pajajaran dengan membedakan atau memisahkan kata Pakuan dan Pajajaran yang masing-masing diberi makna simbolis. Raja zaman dahulu kerap dipandang sebagai pusat alam atau jagat. Jadi kata “Pakuan” menurut G.P. Rouffaer berarti dunia, pakunya alam. Pakuan bisa berarti “Kota Paku”, walaupun sebenarnya lebih tepat diartikan “Kota Pusat” atau “Ibukota”, yaitu kota tempat kedudukan *Paku Ning Jagat* (pakunya alam) atau raja (Danasasmita, 2015).

Sedangkan menurut Poerbatjaraka dalam tulisannya yang berjudul “*De Batoe-Toelis bij Buitenzorg*” (Batutulis dekat bogor) yang dikutip dari buku karya Saleh Danasasmita dengan judul “Mencari Gerbang Pakuan”, dijelaskan bahwa kata “Pakuan” berkaitan dengan kata dalam bahasa Jawa Kuno “*Pakwwan*” yang kemudian seperti tampak pada prasasti Batutulis, dieja “*Pakwan*” (satu ‘w’) yang oleh lidah orang Sunda diucapkan menjadi Pakuan. Kata *Pakwan* berarti kemah atau istana. Menurut Poerbatjaraka, kata Pakuan Pajajaran berarti istana yang berjajar (Danasasmita, 2014).

Dari berbagai keterangan mengenai arti nama Pakuan Pajajaran di atas, terdapat tiga versi nama yang pernah digunakan dalam sumber-sumber sejarah. Ketiga nama tersebut diantaranya yaitu: Pakuan (tanpa Pajajaran), Pajajaran (tanpa Pakuan), dan Pakuan Pajajaran (lengkap). Ketiga nama itu menunjukkan maksud yang sama untuk identitas yang sama pula. Dengan demikian, Pakuan/ Pajajaran/ Pakuan Pajajaran sebagai nama diri atau nama identitas eksistensinya dapat dipertanggung jawabkan secara historis (Zakaria, 2011).

Dari catatan Tome Pires, *Carita Pantun*, *Carita Parahiyangan* dan *Berita Cina* menyatakan bahwa Pakuan Pajajaran semuanya mengarah pada pengertian kota, ibukota, pusat kerajaan dan bukan untuk nama kerajaan itu sendiri. Walaupun demikian tidak dapat dinafikan bahwa tidak jarang nama kerajaan atau negara dikenal melalui nama ibukotanya. Dalam hal ini,

sekiranya dapat disimpulkan bahwa istilah Kerajaan Pajajaran diartikan sebagai “Kerajaan Sunda yang ibu kotanya bernama Pajajaran” (El-Jaquene, 2020).

Menurut keterangan Saleh Danasasmita, Kota Pakuan dijadikan pusat kerajaan Sunda oleh Maharaja Tarusbawa. Dan kerajaan ini mencapai kejayaannya pada masa Sri Baduga Maharaja berkuasa. Dalam tradisi Cirebon, Sri Baduga identik dengan Prabu Siliwangi yang masa mudanya bernama Jayadewata. Jayadewata adalah cucu Prabu Wastukencana yang bertahta di Galuh. Wilayah kekuasaan Sri Baduga Maharaja sangat luas karena meliputi hampir seluruh pulau Jawa. Sebelum meninggal, Prabu Wastukencana membagi wilayah kekusaannya kepada kedua orang puteranya yang masing-masing dibatasi oleh Sungai Citarum. Kerajaan Sunda yang terletak di barat diserahkan kepada Susuktunggal, sedangkan Kerajaan Galuh yang berada di timur Sungai Citarum diserahkan kepada Dewa Niskala. Dewa Niskala memilih pusat pemerintahannya di Kawali, daerah yang terletak sekitar 15 KM arah Utara kota Ciamis sekarang (Danasasmita, 2014).

Nama ibukota Kerajaan Sunda sebenarnya ialah Pakuan. Baru pada waktu Sri Baduga Maharaja naik takhta tahun 1482 M, nama ibukota ditambah dengan kata Pajajaran, sehingga menjadi Pakuan Pajajaran. Penambahan kata Pajajaran pada nama ibukota mungkin dilatarbelakangi oleh upaya perbaikan pembaruan (munar) ibukota oleh Sang Susuktunggal (Mertua dan Raja Sunda yang digantikan oleh Sri Baduga Maharaja) (Ekadjati, 2014).

B. Tujuan Perjanjian antara Kerajaan Sunda dengan Pajajaran dengan Portugis

Setelah kejatuhan Malaka pada bulan Agustus tahun 1511 M, pelabuhan Malaka dikuasai Portugis. Jatuhnya Malaka membuat bangsa Portugis mulai merintis pelayaran demi pelayaran ke negara-negara rempah di Indonesia Timur (Maluku), dan yang bertindak sebagai penunjuk jalan ke Maluku ialah seseorang saudagar India yang sudah terbiasa berlayar ke Maluku untuk mengambil rempah-rempah dengan harga yang murah. Kapal dagang India tersebut dikawal oleh sebuah armada Portugis yang bertolak dari Malaka menuju Maluku. Pelayaran ke negara rempah-rempah berlangsung dengan tertib tanpa mengganggu kapal dagang lainnya, karena tujuan utama pelayaran bangsa Portugis tersebut hanya untuk mengenal jalan dari Malaka menuju Maluku.

Portugis tidak bermaksud mencari musuh baru, melainkan hanya ingin mencari sumber asli rempah-rempah yang nantinya akan memberikan keuntungan yang lebih besar lagi bagi perdagangan bangsa Portugis (Muljana, 2005).

Kunjungan kapal-kapal dagang Portugis mendapat sambutan baik dari orang-orang di kepulauan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Pengangkutan rempah-rempah oleh kapal dagang Portugis yang langsung dari kepulauan Maluku mengakibatkan pedagang Tionghoa menjadi rugi. Para pedagang Tionghoa di Kesultanan Demak merasa sangat dirugikan. Sejak kedatangannya di Malaka, orang-orang Portugis sudah dipandang sebagai musuh oleh orang-orang Demak (Muljana, 2005).

Menjelang akhir abad ke 15 M, di daerah Kerajaan Sunda Pajajaran sudah mulai ada orang-orang yang beragama Islam. Orang-orang yang beragama Islam ini pada umumnya tinggal di kota pelabuhan, dan Pelabuhan Sunda yang paling banyak ditinggali orang Islam ialah Cimanuk (kota pelabuhan yang menjadi batas kerajaan Sunda di sebelah Timur). (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

Peristiwa yang sama diberitakan juga dalam *Pustaka Nagara Krethabumi parwa I sarga 2*. Isinya ialah sebagai berikut:

“Setelah Cirebon menjadi negara merdeka, banyaklah penyar agama Islam datang di kerajaan ini, demikian pula para Wali Sanga di Pulau Jawa selalu bermusyawarah dengan Susuhunan Jati dan para pembesar kerajaan di keraton Pakungwati. Mereka bermusyawarah mengenai agama Islam di desa-desa sekitarnya, dan kemudian di Pakuan Pajajaran dan seluruh Bumi Sunda. Putera sulung Sultan Demak yaitu pangeran Sabrang Lor beserta beberapa anggota pasukannya untuk sementara waktu berada di ibukota Cirebon. Oleh ayahnya, Pangeran Sabrang Lor dijodohkan dengan Nyai Ratu Ayu Puteri Susuhunan Jati. Dalam perkawinannya mereka tidak dikaruniai seorang anak. Oleh karena pasukan Demak berada di Cirebon, dan agama Islam telah tersebar ke desa-desa dan ibukota Pakuan, maka hal ini sangat mencemaskan hati Sang Prabu Pajajaran, karena sejak awal pasukan Demak selalu bersahabat dengan Cirebon” (Danasasmita, 2018).

Selepas kekalahan Malaka yang jatuh ke tangan Portugis pada tanggal 24 Agustus tahun

1511 M, akhirnya Alfonso D’Albuquerque membangun kerja sama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran untuk mengantisipasi serangan balasan dari Sultan Malaka. Di Malaka sebuah benteng dirancang serta dibangun melingkari perbukitan dan menyusuri garis pantai. Benteng tersebut menjadikan Portugis merasa aman berada di dalam benteng Malaka (El-Jaquene, 2020).

Untuk meredam kekuatan Islam yang semakin meluas, Kerajaan Sunda Pajajaran menerapkan dua macam kebijakan. *Pertama*, Sang Ratu Jayadewata (Raja Kerajaan Sunda Pajajaran) berusaha membatasi perdagangan Muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan milik kerajaannya. *Kedua*, Kerajaan Sunda Pajajaran membatasi pengaruh Islam di negaranya dengan menggandeng negara lain yang dipandang memiliki “ideologi” dan kepentingan yang sama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran, yaitu Portugis (Zakaria, 2011).

Sri Baduga Maharaja menyadari kedudukannya yang sedang terjepit dan sulit. Prasasti Kebantenan menyebutkan bahwa Sri Baduga Maharaja berusaha untuk membuat daerah kependetaan bernama Jayagiri dan Sunda Sembawa. Sebagaimana dikatakan pada bagian pembukaannya, naskah *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian* dimaksudkan sebagai pedoman untuk masyarakat Sunda pada umumnya (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

Pada tahun 1512 M sebagai perwujudan dari rencana kerjasama Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis, Sri Baduga Maharaja mengirim beberapa utusannya ke Malaka dibawah pimpinan Ratu Samiam. Pihak Kerajaan Sunda Pajajaran berusaha meyakinkan bangsa Portugis sebuah persahabatan yang saling menguntungkan antara keduanya. Ratu Samiam menginformasikan bahwa sejak Portugis berkuasa di Malaka, pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda Pajajaran berkembang dengan pesat sehingga cukup memegang peranan penting dalam jalur perdagangan Nusantara (Zakaria, 2011).

Utusan yang dikirim dari Kerajaan Sunda Pajajaran atas perintah dari Sri Baduga Maharaja merupakan “penjajakan awal” kerjasama antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis sebagai antisipasi menguatnya kekuatan Islam di Jawa (Cirebon dan Demak). Sri Baduga Maharaja merasa cemas ketika hubungan Kesultanan Demak dan Cirebon dikukuhkan dengan pernikahan putera dan puteri dari kedua belah pihak. Berkat hubungan antara Kesultanan Demak dengan Cirebon ada empat

pasangan dari kedua belah pihak yang dijodohkan, diantaranya yaitu: Pangeran Sabakinkin (Hasanuddin) dengan Ratu Ayu Kirana (Puranamasidi), Ratu Ayu dengan Pati Unus, Pangeran Jayakelana dengan Ratu Pembayun, dan Pangeran Bratakelana dengan Ratu Ayu Wulan (Ratu Nyawa) (Widiatmoko, 2015).

Selain tujuan untuk menyelamatkan perniagaan Sunda, perjanjian Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis juga dimaksudkan untuk menyelamatkan Kerajaan Sunda Pajajaran secara umum. Hubungan dengan Portugis sudah dimulai pada tahun 1512 M, ketika Sri Baduga Maharaja mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Ratu Samiam (Sanghyang) yang meminta bantuan kepada Alfonso D'Albuquerque. Ratu Samiam untuk kedua kalinya datang ke Malaka pada tahun 1521 M dengan maksud meminta bantuan kepada Portugis, tetapi pada saat itu penguasa Malaka sudah digantikan oleh Jorge D'Albuquerque (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

Sebagaimana dikutip dalam buku karya Saleh Danasasmitha "Menelusuri Situs Prasasti Batu Tulis", bahwa pengiriman utusan Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Portugis juga disebutkan dalam *Pustaka Nagara Krethabumi parwa I sarga 2*, yakni:

"Oleh Karena itu Sang Prabu Pakuan Pajajaran mengutus Putera Mahkota, Ratu Sangiang yaitu Sang Prabu Surawisesa namanya. Duta kerajaan Pajajaran ini menuju negeri Malaka. Disana sang duta mengadakan persahabatan dengan pemimpin orang Portugis (*Petege*) yaitu Laksamana Bungker (D'Albuquerque) namanya. Mereka berjanji senantiasa akan bersahabat dengan kerajaan Pakuan Pajajaran bila pasukan Demak dan Cirebon menyerangnya, dan akan mengadakan hubungan niaga segala macam barang. Setahun kemudian orang Portugis datang di Pulau Jawa melihat-lihat keadaan di sini. Kapal mereka berjumlah 4 buah. Mereka setiap kali berhenti di semua pelabuhan yang ada di negeri Sunda dan sang bule ini membuat surat (tulisan). 'Kelak setelah Putera Mahkota menjadi Maharaja Sunda dengan gelar Sang Prabu Surawisesa setelah ayahnya, yaitu Sang Ratu Dewata atau Sang Sri Baduga Maharaja yang mendiang di Rancamaya

yang memerintah selama 39 tahun" (Danasasmitha, 2018).

Dalam berita Portugis juga dikatakan, bahwa pada tahun 1512 M dan 1521 M Ratu Samiam (Sanghyang) dari Kerajaan Sunda Pajajaran memimpin perutusan ke Malaka. Dan pada tahun 1522 M, Henrique De Leme memimpin perutusan Portugis ke Kerajaan Sunda Pajajaran. Ketika Portugis datang mengunjungi Kerajaan Sunda Pajajaran, Ratu Samiam sudah berkuasa di Kerajaan Sunda Pajajaran. Jika dihubungkan dengan *Carita Parahiyangan*, berarti Ratu Samiam menurut berita Portugis tidak lain adalah Prabu Surawisesa, Seorang raja gagah dan berani yang menggantikan Sri Baduga Maharaja dan memerintah selama 14 tahun (1521-1535 M) (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

Pada tahun 1521 M telah terjadi pergantian tahta dari Sri Baduga Maharaja kepada Prabu Surawisesa di Kerajaan Sunda Pajajaran. Peristiwa ini sejalan dengan berita dari *Carita Parahiyangan* yang mengatakan bahwa Sri Baduga Maharaja digantikan oleh Surawisesa setelah Sri Baduga Maharaja berkuasa selama 39 tahun. Dari berita dalam *Carita Parahiyangan* dapat dipastikan bahwa Surawisesa menurut *Carita Parahiyangan* adalah Ratu Samiam menurut berita Portugis. Sebelum naik takhta, Ratu Samiam mempunyai kedudukan cukup tinggi yang kemungkinan besar adalah sebagai Putera Mahkota. (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

Penempatan Surawisesa di Sangiang yang membawahi Pelabuhan Sunda Kalapa adalah strategi politik Sri Baduga Maharaja. Dari penempatan Prabu Surawisesa sebetulnya sudah tampak jelas maksud Sri Baduga Maharaja menetapkan Pakuan Pajajaran menjadi pusat kerajaan untuk menggantikan Kawali. *Pertama*, Kawali terlalu dekat dengan Cirebon. Meskipun Cirebon adalah kerajaan bawahan Pajajaran, namun sudah menjadi pusat perkembangan Islam. *Kedua*, dalam tahun 1482 M perdagangan laut internasional yang berpusat di Malaka sudah demikian maju dan yang menjadi gerbang laut Nusantara hanya Selat Sunda dan Selat Malaka. Sementara itu Pakuan Pajajaran lebih dekat ke Pelabuhan Sunda Kalapa dan tidak terlalu jauh dari Banten (Danasasmitha, 2015).

H. Ten Dam telah menguraikan dalam *majalah Indonesie* tahun 1957 M yang berjudul "*Verkenningen Rondom Pajajaran*". Politik Sri Baduga Maharaja memang bertujuan untuk menempatkan calon penggantinya berkuasa atas

Pelabuhan Sunda Kelapa. Sri Baduga Maharaja berharap bahwa raja yang akan menggantikannya adalah “Raja Saudagar”, bukan “Raja Petani” sebagaimana leluhurnya. Oleh karena itu, putera mahkota diutus hingga dua kali ke Malaka, sebab bagi Pajajaran lebih baik bersahabat dengan Portugis dari pada dengan Kesultanan Demak. Salah satu di antara penyebabnya mungkin karena alasan agama (Danasasmita, 2015).

Pada kunjungan kedua bangsa Portugis merupakan kunjungan balasan dalam rangka persetujuan diantara kedua belah pihak, utusan Portugis yang dipimpin oleh Henrique De Leme datang ke Pakuan pada 1522 M. Disebutkan bahwa, *Dayo/ Dayeuh*, (kota/ibukota) tempat tinggal Raja Sunda Pajajaran berada tidak jauh dari pelabuhan. Ratu Samiam yang pernah menjadi perutusan Kerajaan Sunda Pajajaran yang dikirim ke Malaka sudah menjadi raja dan berdiam di *Dayo*, pusat Kerajaan Sunda Pajajaran. Bagi orang Portugis, Surawisesa (Samiam) bukan orang baru. Dapat dikatakan bahwa Surawisesa sudah menjadi sahabat karib Portugis, karena sudah dua kali bertemu dengan Portugis (Danasasmita, 2014).

Pada buku karya Saleh Danasasmita yang berjudul “*Menelusuri Situs Prasasti Batutulis*” dituliskan sumber Portugis yang dikutip oleh Hageman yang memberitakan mengenai perjanjian ini, yaitu:

In het jaar 1512, kwan er een heidensche koning van Zunda, genaamd Samiam, zijne hulde bij Alfonso d'Albuquerque aanbieden. Deze koning Samiam kwan andermal te Malaka in 1521, toen Jorge d'Albuquerque aldaar gezaghebber was. uit de opgaven van deze “Re de Zunda” vernam Dom Jorge veel van den handel van Zunda, en wilde daarom een proef nemen en zond in 1522 zijn zwager Henriquez de Leme met een schip van Malaka naar Zunda, met geschenken voor de koning Samiam die daar her van het land was.

(Dalam tahun 1512 datang (ke Malaka) seorang raja Sunda yang masih “kafir” bernama Sangiyang menyampaikan hormatnya kepada Alfonso d’Albuquerque. Raja Sangiyang ini datang sekali lagi di Malaka tahun 1521 ketika Jorge d’Albuquerque menjadi pemegang kekuasaan disana. Dari keterangan-keterangan yang diberitakan Raja Sunda ini, Dom Jorge

menjadi sangat tertarik oleh perdagangan Sunda, dan oleh karena itu ingin mencobanya, lalu dalam tahun 1522 mengirim iparnya, Henriquez de Leme dengan sebuah kapal dari Malaka ke Sunda, sambil membawa hadiah untuk Ratu Sangiang yang (telah menjadi penguasa disana) (Danasasmita, 2018).

Pada buku Saleh Danasasmita yang berjudul “*Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi*” juga menyampaikan berita yang sama. Menurut berita dari orang Portugis yang dikutip oleh Hageman dalam “*Geschiedenis der Sundalanden*” pada tahun 1512 M ada seorang raja Sunda bernama Samiam datang ke Malaka untuk urusan dagang dengan Alfonso D’Albuquerque. Raja tersebut datang lagi pada tahun 1521 M. Alfonso D’Albuquerque tertarik untuk menjalin hubungan dagang dengan Sunda. Kemudian Alfonso D’Albuquerque mengutus iparnya, Henrique De Leme memimpin utusan Portugis ke ibukota Sunda. Kedatangan utusan Portugis terjadi pada 1522 M (Raja Sunda) (Danasasmita, 2015).

Hasil perundingan antara Kerajaan Sunda Pajajaran dan Portugis akhirnya dibuat perjanjian pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 M. Naskah perjanjian dibuat rangkap dua, dan setiap pihak memegang satu salinan (Danasasmita, 2015). Dalam sumber Portugis yang kemudian dikutip oleh Hageman juga menyebutkan, “*Van Deze Overeenkomst Werd Een Geschrift Opgemaakt in Dubbel, Waarvan Elke Partij Een Behield*” (Dari perjanjian ini dibuat tulisan rangkap dua, lalu masing-masing dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa) (Widiatmoko, 2015).

Perjanjian antara Kerajaan Sunda Pajajaran dan Portugis ini di resmikan dengan menuliskannya diatas sebuah kertas yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian ini diantaranya memuat ketentuan bahwa Portugis diizinkan mendirikan benteng, dan nantinya Portugis akan memberikan bantuan apabila Kerajaan Sunda Pajajaran mendapat serangan dari pihak musuh. Perjanjian lain yang tidak kalah pentingnya ialah persetujuan perdagangan (Danasasmita, 2018).

Perjanjian antara Portugis dengan Kerajaan Sunda Pajajaran ditandatangani langsung oleh Ratu Samiam (Prabu Surawisesa) sebagai perwakilan dari Kerajaan Sunda Pajajaran dan Henrique De Leme sebagai perwakilan dari Portugis. Ketika sedang mengadakan perundingan Ratu Samiam didampingi oleh tiga pembantu utamanya, yaitu Mantri Dalam

(*Mandari Tadani*), Tumenggung Sang Adipati (*Tamugo Sanque De Pate*), dan Syahbandar (*Bengar Xabandar*). Sementara itu, Henrique De Leme didampingi oleh Fernando De Almeida, Francisco Anes, Manuel Mendes, Joao Coutinho, Gil Barboza, Tome Pinto, Sebastian Do Rego, dan Francisco Diaz (Lubis, 2003).

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perjanjian yang kemudian diselenggarakan antara Portugis dan Kerajaan Sunda Pajajaran berlangsung ketika Ratu Samiam atau Surawisesa berkuasa, dan perjanjian itu terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 M (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019). Di antara isi perjanjian Kerajaan Pajajaran dan Portugis ialah pihak Pajajaran dalam jangka waktu setahun akan memberikan 1.000 karung merica yang harus ditukar oleh Portugis dengan barang-barang kebutuhan Kerajaan Pajajaran. Kemudian Portugis diberi izin mendirikan benteng di Pelabuhan Kalapa. Adapun hal yang rahasia dalam perjanjian kedua belah pihak ialah akan menghadapi Demak bersama-sama (Danasasmita, 2014).

Berdasarkan catatan yang ditulis oleh penulis terkenal asal Portugis, yakni Joao De Barros juga memberitakan hal yang sama, yaitu:

“Pada tahun 1522 M, Jorge De Albuquerque “kapitan” kota Malaka mengirim sebuah kapal yang dipimpin oleh Henrique De Leme menghadap Samiam (Raja Sunda) untuk menjalankan urusan perdagangan. Pada saat utusan Henrique De Leme tiba di pelabuhan Sunda, Raja Sunda menerima orang-orang Portugis dengan baik agar memperoleh bantuan Portugis dalam peperangan yang sedang berlangsung melawan orang Islam. Untuk memperkuat hubungan dagang dengan orang Portugis, mereka juga diberikan hak untuk membangun sebuah benteng dan menjaminkannya dengan memperbolehkan orang Portugis memuat sejumlah lada sepuasnya. Selain itu, raja juga berjanji memberikan 1.000 karung lada setiap tahunnya kepada Raja Portugis saat mulai dibangunnya sebuah benteng Portugis” (Guillot, 2008).

Berdasarkan dari berbagai sumber yang didapat mengenai isi perjanjian Kerajaan Pajajaran dengan Portugis, dapat dipastikan

bahwa isi perjanjian antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis diantaranya yaitu: *Pertama*, Sunda dan Portugis akan bekerja sama menghadapi kekuatan pihak Islam. *Kedua*, Portugis diberikan izin untuk mendirikan benteng di pelabuhan Sunda. *Ketiga*, setiap tahun Kerajaan Sunda akan menyerahkan 1000 karung merica/ lada untuk ditukarkan dengan barang-barang keperluan Kerajaan Sunda Pajajaran (Danasasmita, 2015).

Perjanjian tersebut merupakan tanda persahabatan antara Raja Sunda dan Raja Portugis. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Sunda dan Portugis, akan tetapi Sukanto dalam bukunya yang berjudul “*Djakarta 429 Tahun*”, disebut “Perjanjian antara Pajajaran dengan Portugis”. Ini menandakan Sukanto juga mengakui bahwa yang disebut Sunda disini adalah Pajajaran. Selanjutnya disebutkan bahwa para petinggi Sunda menunjuk calon lokasi untuk mendirikan benteng yang diperjanjikan (Danasasmita, 2015). Henrique De Leme dengan para pembesar Portugis dan Sunda kemudian menuju ke ibukota Pakuan Pajajaran. Ketika Henrique De Leme berkunjung ke Kerajaan Sunda Pajajaran, Prabu Surawisesa telah menjadi penguasa Pajajaran menggantikan ayahnya (Sri Baduga Maharaja) yang mendiang di Rancamaya. Sang Prabu Pajajaran dihuturi hadiah (*Dinaksinan*) oleh Henrique De Leme (Danasasmita, 2018). Atas perintah Raja Samiam, Henrique De Leme diantarakan ke lokasi yang akan menjadi tempat dibangunnya benteng tersebut, yakni disebelah kanan muara Sungai Ciliwung yang masih berada di kawasan yang dinamai dengan Kalapa. Kemudian dibuatlah batu *Padrao* di dekat muara Sungai Ciliwung (Guillot, 2008).

Perjanjian antara Kerajaan Sunda Pajajaran dan Portugis merupakan perjanjian internasional tertulis yang pertama dalam sejarah Nusantara. Berbeda halnya dengan perjanjian dagang dengan VOC, yang merupakan perusahaan dagang swasta dan tidak mewakili kerajaannya atau negaranya. Sedangkan orang Portugis resmi bertindak atas nama Raja Portugal (Danasasmita, 2015).

Berdasarkan pendapat H. Ten Dam, perjanjian antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis tidak berupa traktat dan tidak ada tanda tangan, karena perjanjiannya hanya bersifat lisan. Adapun pengukuhan perjanjiannya dengan cara selamatan di Pelabuhan Sunda Kelapa. Memang menurut berita Portugis ada penyelenggaraan selamatan di Pelabuhan Sunda Kalapa setelah Portugis memilih

dan menandai tanah yang akan dijadikan benteng (Danasasmita, 2014).

Perjanjian Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis tidak dipungkiri keberadaannya. Karena didalam Prasasti Batutulis yang sekarang masih tersimpan di kota Bogor menyebutkan bahwa:

“Negara Sunda didirikan oleh Sri Baduga Maharaja pada tahun 1333 M. Ibu kotanya terletak di kota Bogor sekarang. Pada tahun 1522 M, orang-orang Portugis sudah sampai di pelabuhan Sunda untuk mengadakan perjanjian dagang dengan Raja Sunda. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 M, telah dicapai persetujuan antara pihak Portugis dan pihak Sunda untuk mengadakan hubungan dagang. Dalam persetujuan itu dinyatakan diantaranya bahwa orang-orang Portugis diizinkan mendirikan benteng. Tempat yang disetujui untuk membangun benteng tersebut adalah Pelabuhan Kalapa” (Muljana, 2005).

Walaupun sebelumnya sudah ditetapkan bahwa *Loji* Portugis akan didirikan di Banten, namun kenyataannya Bangsa Portugis memilih Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai tempat yang cocok untuk pendirian *Loji* Portugis (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

C. Pengaruh Aliansi Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis bagi Kesultanan Demak

Kesultanan Demak merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selain itu Kesultanan Demak juga memegang peranan penting dalam bidang perdagangan. Perdagangan yang dijalankan antara Kesultanan Demak dengan Malaka ialah beras dan bahan pangan lainnya. Hubungan perdagangan tersebut mulai terganggu sejak Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511 M (Hayati, dkk., 2000).

Setelah Portugis berhasil menguasai Malaka, orang-orang Portugis menemukan kenyataan di luar perkiraan. Malaka yang berada di bawah kekuasaan Portugis ternyata memiliki kekayaan bumi yang tidak habis-habisnya. Selain itu Malaka juga berperan sebagai imperium serta pelabuhan transit bagi para pedagang Asia. Kenyataan bahwa Malaka sangat berperan

penting bagi jalur perdagangan Asia membuat Portugis semakin berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara (Abdullah, 2020).

Keberadaan Portugis di Malaka sangat mengganggu aktivitas perdagangan dan pelayaran para pedagang Islam, termasuk Kesultanan Demak. Ditambah lagi dengan ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Ekspansi bangsa Portugis selain didorong oleh motivasi ekonomis komersial juga didorong oleh misi religius, yaitu meneruskan Perang Salib melawan orang-orang Moro (Islam). Para pedagang Asia, khususnya pedagang Islam merasa terganggu dan tidak nyaman lagi berdagang di Kota Malaka (Hayati, dkk., 2000).

Sejak Portugis menguasai Malaka, distribusi rempah-rempah dari Kepulauan Nusantara di Timur menuju pasar besar di Barat harus mengikuti kebijakan penguasa Selat Malaka (Portugis). Sedangkan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjadi kekuatan penantang bagi Portugis di Selat Malaka (El-Jaquene, 2020).

Ketika Portugis menguasai Malaka, wilayah Nusantara mengalami perubahan signifikan mengenai struktur masyarakat di beberapa wilayah yang sebelumnya masih mengacu kepada warisan Kerajaan Hindu-Buddha. Namun terdapat satu kerajaan yang setia dan mau bekerja sama dengan Portugis, yaitu Kerajaan Sunda Pajajaran. Hal ini bukan berarti tanpa alasan, akan tetapi setelah terjadi serangan besar-besaran dari Cirebon dibantu dengan Kesultanan Demak menjadikan Kerajaan Sunda Pajajaran butuh pendonor kekuatan. Satu-satunya jalan agar Kerajaan Sunda Pajajaran tetap berdiri adalah dengan mendekati Portugis (El-Jaquene, 2020).

Perjanjian antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis menyulut reaksi keras Sultan Trenggana (Sultan Demak III). Bangsa Portugis berhasil menguasai Selat Malaka yang menjadi pintu antara Samudera Hindia dengan Laut China Selatan, apabila Selat Sunda yang kemudian menjadi satu-satunya pintu keluar dari Laut Jawa menuju Samudera Hindia juga dapat dikuasai oleh Portugis nantinya akan mengakibatkan terkuncinya seluruh jalur perdagangan di Nusantara dan China ke dalam satu monopoli. Perniagaan dunia yang telah terhubung berabad-abad lamanya dari Laut China, Samudera Hindia, Teluk Persia, hingga ke Madagaskar dan Al Jazair akan mengalami blokade yang telak dikarenakan kebijakan politik Portugis

berjalan diatas kebencian terhadap pemerintahan dan orang-orang Muslim (Widiatmoko, 2015).

Perjanjian tersebut sangat mencemaskan Kesultanan Demak, karena Selat Malaka juga sudah dikuasai oleh Portugis. Apabila Banten sebagai pintu masuk Nusantara disebelah selatan juga dapat dikuasai Portugis, maka perdagangan laut yang menjadi sumber utama kehidupan ekonomi Kesultanan Demak terancam akan terputus (Danasasmita, 2018). Dari sini sudah terlihat bahwa yang menguasai Malaka adalah Portugis dan Kerajaan Sunda Pajajaran. Sedangkan dari kubu Cirebon dan Kesultanan Demak merasa khawatir atas hal ini. Apabila ditelisik dari segi silsilah, Cirebon sendiri masih memiliki hubungan dengan Kerajaan Sunda Pajajaran. Tentu hal yang tidak pantas apabila Cirebon menyerang Kerajaan Sunda Pajajaran hanya karena ingin menjadikan Malaka di dominasi oleh kaum Muslim. Namun apabila masalah ini dibiarkan yang terjadi adalah krisis perekonomian yang mengakibatkan Kesultanan Demak dan Cirebon menjadi kerajaan yang tidak dapat berkembang, karena jalur maritim adalah penyumbang terbesar kemajuan kerajaan di Nusantara (El-Jaquene, 2020).

Semakin meluasnya pengaruh Portugis di dataran Nusantara dan perpindahan jalur perdagangan secara tidak langsung telah menjadi ancaman serius bagi Kesultanan Demak. Oleh karena itu, Raden Patah berusaha mempererat hubungannya dengan Kesultanan Banten dan Cirebon. Hubungan antara Kesultanan Demak, Banten dan Cirebon semakin erat ketika Adipati Unus memutuskan untuk menikahi putri Sunan Gunung Jati, yakni Raden Ayu pada tahun 1511 M. (Abdullah, 2020).

Jatuhnya Kerajaan Samudera Pasai ke tangan Portugis tahun 1512 M, semakin mendesak Adipati Unus sebagai Panglima Armada Islam melakukan ekspedisi ke Malaka untuk menghalau semakin meluasnya kekuasaan Portugis. Tahun 1513 M, Adipati Unus memutuskan untuk menyerbu Malaka. Ekspedisi ke Malaka ini dikenal dengan sebutan ekspedisi *Jihad I* (Abdullah, 2020).

Dalam ekspedisi ke Malaka, Adipati Unus menyerbu Malaka dengan dilengkapi sejumlah meriam besar yang dibuat di Jawa. Adipati Unus mengirim pasukan ke Malaka dari Jepara yang diperkirakan ada seratus buah kapal yang terdiri

dari empat puluh jung dan enam puluh lancana dengan ukuran kapal terkecil berkapasitas dua ratus ton. Kapal induk pasukan Adipati Unus sangat besar. Setiap sisi kapal terbentuk dari tujuh lapis papan yang direkat dengan turap beraspal. Kapal besar tersebut memiliki tiga anjungan dan mampu memuat hampir seribu orang (Adrisianti, dkk., 2022).

Namun disayangkan ekspedisi pertama pasukan Adipati Unus berhasil dikalahkan oleh Portugis dan armada yang dikirimkan ke Malaka tercerai berai. Kegagalan ekspedisi *Jihad I* ini dikarenakan masih kurangnya persiapan dan juga jumlah pasukan. Dari kekurangan ini menjadi pelajaran berharga bagi Adipati Unus. Atas kekalahan itu, Adipati Unus mulai membangun armada besar dengan mengumpulkan sebanyak 375 kapal perang yang langsung diambil dari Tanah Gowa (Sulawesi) yang masyarakatnya terkenal sebagai ahli pembuatan kapal perang. Belum usai dengan pembuatan armada besar tersebut, Adipati Unus harus menerima kenyataan pahit ketika penguasa Kesultanan Demak, Raden Patah meninggal. Meninggalnya Raden Patah semakin membebani Adipati Unus (Abdullah, 2020).

Sebagai penguasa Kesultanan Demak yang baru, Adipati Unus lebih banyak fokus pada pembuatan armada angkatan perang yang akan dikirimkan ke Malaka untuk menggempur Portugis. Hal ini terbukti pada tahun 1521 M 375 kapal perang yang telah selesai dibangun segera diberangkatkan ke Malaka. Pemberangkatan armada angkatan perang Adipati Unus yang kedua kalinya ini dikenal dengan sebutan ekspedisi *Jihad II* (Abdullah, 2020).

Pasukan Portugis yang sudah mengetahui bahwa akan terjadi penyerangan besar-besaran dari Jawa sudah mempersiapkan pertahanan dengan menempatkan puluhan meriam besar di setiap benteng Malaka. Sesampainya di Malaka, angkatan perang Adipati Unus langsung dibombardir dengan meriam-meriam yang sudah dipersiapkan. Bahkan, sebelum merapat ke pantai, perahu yang ditumpangi Adipati Unus karam terkena peluru meriam Portugis. Karamnya perahu ini mengakibatkan gugurnya Adipati Unus. Armada gabungan angkatan perang kesultanan Islam kemudian dipimpin oleh Fadlullah Khan (Tubagus Pasai) atau yang akrab dipanggil Fatahillah (Abdullah, 2020).

Putra kedua Adipati Unus yakni Raden Abdullah berhasil selamat dalam peperangan melawan Portugis. Raden Abdullah kemudian bergabung dengan armada yang tersisa untuk

kembali ke tanah Jawa bersama sebagian tentara Kesultanan Malaka yang memutuskan hijrah karena negerinya gagal direbut kembali dari Portugis. Pasukan Kesultanan Demak akhirnya memutuskan untuk mundur dibawah pimpinan Fatahillah (Widiatmoko, 2015).

Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana Kesultanan Demak harus menghadapi ancaman serius dari Portugis. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, rute pelayaran dan perdagangan juga ikut berubah. Perubahan rute pelayaran dan perdagangan menjadikan wilayah Banten dan Sunda Kelapa menjadi daerah yang sangat diperhitungkan. Oleh karena itu, Portugis berusaha memikat hati Raja Sunda Pajajaran (Sri Baduga Maharaja) dan penguasa Sunda Kelapa (Surawisesa) dengan tujuan menguasai Selat Sunda (Abdullah, 2020).

Rencana Portugis untuk menduduki Selat Sunda berhasil diketahui oleh Sultan Trenggana. Untuk menghentikan niat Portugis, Sultan Trenggana mengirimkan pasukannya ke Banten (Abdullah, 2020). Atas kecemasan Sultan Trenggana berkenaan dengan dibukanya pintu bagi Portugis di wilayah Sunda juga segera ditanggapi oleh Sunan Gunung Jati. Tubagus Pasai (Fatahillah) sebagai panglima yang membawahi armada Kesultanan Demak dan Cirebon juga diutus untuk menghadang Kerajaan Sunda Pajajaran (Widiatmoko, 2015).

Pada tahun 1526 M ekspedisi perebutan pelabuhan Banten di mulai. Gabungan Angkatan Laut Kesultanan Demak dengan Cirebon dipimpin oleh Fatahillah. Menjelang kedatangan Fatahillah di Banten, Maulana Hasanudin dengan para pengikutnya mendahului mengadakan ekspedisi ke Banten. Akhirnya Banten dapat dikuasai, sedangkan bupati Banten, yaitu Arya Surajaya (Prabu Pucuk Umun) beserta para pengiringnya mengungsi ke Kerajaan Sunda Pajajaran (Danasasmita, 2018). Keseluruhan pasukan Fatahillah diperkirakan berjumlah 1.967 orang, dimana didalamnya turut pula Pangeran Cirebon, Dipati Cangkung, Dipati Keling serta pasukan lokal dibawah pimpinan Maulana Hasanuddin. Sasaran pertama pasukan Demak adalah Banten. Karena dalam catatan sumber Portugis, Banten merupakan salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda Pajajaran, sehingga Kesultanan Demak perlu merintis untuk menguasai wilayah Banten terlebih dahulu (Widiatmoko, 2015).

Setelah Banten berhasil dikuasai, Sunan Gunung Jati kemudian memindahkan pusat kekuasaan dekat Pelabuhan Banten yang disebut dengan nama Surosowan. Pemindahan letak kekuasaan Banten dilakukan pada tanggal 1 Muharram 933 H atau bertepatan dengan 8 Oktober 1526 M dan Pangeran Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Panembahan Surosowan di Banten oleh ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) (Widiatmoko, 2015). Pada tahun 1527 M setelah menaklukan wilayah Banten, Fatahillah berhasil menguasai Pelabuhan Sunda Kalapa dan ditunjuk menjadi Bupati di Pelabuhan Sunda Kalapa (Danasasmita, 2018).

Pada tanggal 23 Oktober tahun 1526 M armada Portugis sedang menyiapkan serangan terhadap Pulau Bintan dibawah pimpinan Pero Mascarenhas. Kemudian Fransisco De Sa beserta armadanya bergabung dengan Armada Pero Mascarenhas (Guillot, 2008). Ketika sedang dalam perjalanan menuju Kerajaan Sunda Pajajaran, para armada Portugis terkejut badai. Tetapi terdapat salah seorang kapten Armada Portugis yang bernama Duarto Coelho yang berhasil sampai di Sunda Kalapa. Kapal Duarto Coelho terdampar di pantai dekat Pelabuhan Sunda Kalapa dan semua awak kapal diserang oleh pasukan Islam yang beberapa hari sebelumnya telah berhasil menaklukkan wilayah Sunda Kalapa (Guillot, 2008).

Menurut Slamet Mulyana Kapal salah satu pasukan Portugis yang terpisah itu terdampar dipantai dekat Pelabuhan Sunda Kelapa. Kemudian kapal Portugis diserang oleh pasukan Muslim yang sebelumnya telah berhasil menduduki kota Pelabuhan Sunda Kelapa dibawah kepemimpinan Fatahillah. Armada Portugis yang berhasil tiba dipelabuhan Sunda Kelapa ialah kapal Fransisco De Sa dan pasukannya, bukan kapal Duarto Coelho dan pasukannya (Muljana, 2005).

Pasukan Fatahillah berhasil memukul mundur pasukan Portugis dan pasukan Portugis menderita kerugian yang besar serta menelan banyak korban, sehingga orang-orang Portugis mengundurkan diri ke Samudera Pasai. Meskipun terdapat perbedaan mengenai pasukan Portugis yang sampai di Pelabuhan Sunda Kalapa ini namun hal terpenting yang perlu ditekankan dalam pembahasan ini ialah mengenai pemberangkatan pasukan Portugis dari Malaka menuju Sunda Kalapa untuk mendirikan benteng dan melaksanakan janji bantuan yang telah

disepakati oleh pihak Portugis dengan penguasa Kerajaan Sunda Pajajaran (Danasasmita, 2018).

Namun janji bantuan dan pembangunan benteng Portugis terlambat dilakukan. Fransisco De Sa yang ditugaskan melakukan pembangunan benteng ditunjuk menjadi Gubernur Goa. Armada yang diberangkatkan oleh Portugis dengan berkekuatan 6 kapal yang memuat bahan-bahan untuk membangun benteng diserang badai di Teluk Benggala. Kapal-kapal pembawa perlengkapan beserta 60 kelasinya tenggelam dan hanya sebagian saja yang berhasil sampai di Sunda Kalapa (Danasasmita, 2018). Sunda Kelapa pada tahun 1527 M sudah dikuasai oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Fatahillah. Usaha-usaha untuk merebutnya dari tangan Islam oleh pihak Portugis tidak pernah berhasil sehingga benteng Portugis tidak pernah didirikan (Muljana, 2005).

Disisi lain Surawisesa merasa putus asa mengharapkan bantuan Portugis yang tidak pernah tiba. Akhirnya Surawisesa terpaksa berperang sendiri melawan pasukan Islam (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019). Surawisesa dengan pasukan bela mati berkekuatan 1000 orang masih dapat memadamkan pemberontakan didalam Kerajaan Sunda Pajajaran dan dapat menahan pasukan gabungan Kesultanan Demak dengan Cirebon di daerah pelabuhan, dan kejadian ini berlangsung selama lima tahun (Danasasmita, 2018).

Carita Parahiyangan memberitakan bahwa masa pemerintahan Surawisesa selama 14 tahun (1521-1535 M) hanya berperang sebanyak 15 kali, dan tidak pernah mengalami kekalahan. Surawisesa berperang ke Kalapa, Tanjung, Ancol kiji, Wahanten Girang, Simpang, Gunung Batu, Saung Agung, Rumbut, Gunung, Gunung Banjar, Padang, Panggoakan, Muntur, Hanum, Pagerwesi, dan Medangkahyangan. Hal ini menunjukkan bahwa sampai pada akhir masa pemerintahan Surawisesa walaupun ancaman pihak Islam sudah sering terbukti, pihak Kerajaan Sunda Pajajaran masih dapat bertahan dan mengalahkan tentara Islam (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

Pada tahun 1531 M ditandatangani perjanjian perdamaian antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Cirebon. Surawisesa adalah saudara seayah Lara Santang (Ibunda Syarif Hidayatullah). Kesultanan Cirebon dan Banten

sebenarnya masih memiliki darah Kerajaan Sunda Pajajaran. Dengan dasar persaudaraan diantara Surawisesa dan Syarif Hidayatullah, maka Kerajaan Sunda Pajajaran dan Cirebon berjanji tidak akan saling menyerang dan masing-masing berdiri sebagai kerajaan merdeka yang berdaulat. Naskah perjanjian ini dibuat di Cirebon dan ditandatangani oleh Syarif Hidayatullah dan Surawisesa. Selain itu dari pihak Cirebon yang juga ikut membubuhkan tandatangan diantaranya ialah Bupati Banten (Hasanuddin), Bupati Sunda Kalapa (Fatahillah) dan Putera Mahkota Cirebon (Abdul Arifin, Pangeran Pasarean) (Danasasmita, 2018).

Kerajaan Sunda Pajajaran sebenarnya sudah mulai mengalami kemunduran sepeninggal Sri Baduga Maharaja karena munculnya kekuatan baru dari Cirebon yang dibantu Demak dan Banten. Kerajaan Sunda Pajajaran mengalami kemunduran sejak Surawisesa digantikan oleh Ratu Sakti (1543-1551 M). Dibawah kepemimpinan Ratu Sakti nasib rakyat Kerajaan Sunda Pajajaran diabaikan, yang dipentingkan hanya kesenangan pribadi. Ratu Sakti digantikan oleh Prabu Nilakendra (1551-1567 M) (Setiadi, 2015).

Raja terakhir Kerajaan Sunda Pajajaran adalah Raga Mulya, yang memerintah sebagai raja selama 12 tahun. Dalam naskah *Wangsekerta* sosok Raga Mulya disebut sebagai Prabu Suryakencana, sedangkan dalam *Carita Parahiyangan* dikenal dengan nama Nusya Mulya (El-Jaquene, 2020). Pada masa pemerintahan Raga Mulya keadaan Kerajaan Sunda Pajajaran sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perubahan di tengah penduduk semakin terasa, terutama yang disebabkan oleh kedatangan Islam. Pada masa pemerintahan Raga Mulya inilah Islam mulai memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam peperangan yang dilakukan. Satu persatu daerah Raja Galuh, Kalapa, Pakwan, Datar, Mandiri, Jawakapala, Gegelang, dan Salajo berhasil dikalahkan. Bahkan *Patege* atau Portugis sendiri dikatakan dapat dikalahkan oleh Islam. Bersamaan dengan itu, tamat pula riwayat Kerajaan Sunda Pajajaran sebagai salah satu benteng terakhir kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai “*Pengaruh Aliansi Kerajaan Sunda Pajajaran Dengan Portugis Tahun 1522 M Bagi Kesultanan Demak*”, sekiranya dapat diambil kesimpulan bahwa

Kerajaan Sunda Pajajaran merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu yang ibu kotanya berada di Pakuan. Kerajaan Sunda Pajajaran didirikan pada tahun 1482 M, setelah Kerajaan Majapahit runtuh. Berdirinya Kerajaan Sunda Pajajaran terhitung sejak masa pemerintahan Prabu Jayadewata yang merupakan keturunan dari Prabu Dewa Niskala (Raja Kerajaan Galuh). Setelah diangkat menjadi raja, Prabu Jayadewata mendapatkan gelar Sri Baduga Maharaja.

Bentuk jalinan kerjasama Pajajaran dengan Portugis bermula ketika kedatangan bangsa Portugis ke wilayah Asia. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1511 M, pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Selepas kekalahan Malaka dan berhasil menguasai jalur perdagangan di Maluku, Alfonso d'Albuquerque membangun kerja sama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan Sunda Pajajaran merasa perlu menjalin kerjasama dengan Portugis agar dapat menghalau serangan Kesultanan Demak yang mengancam eksistensi kerajaannya. Perjanjian Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 M. Kerjasama ini diresmikan dengan memancangkan batu besar (Padrao) di pelabuhan Sunda sebagai tanda wilayah kekuasaan Portugis. Adanya Perjanjian antara Pajajaran dengan Portugis menyulut reaksi keras Sultan Trenggono (Sultan Demak III).

Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kesultanan Demak semakin menghadapi ancaman serius dari Portugis. Rencana Portugis untuk menduduki Selat Sunda berhasil diketahui oleh Sultan Trenggono. Untuk menghentikan niat Portugis, Sultan Trenggono mengirimkan pasukannya ke Banten. Selain itu, Tubagus Pasai (Fatahillah) sebagai panglima yang membawahi armada Kesultanan Demak dan Cirebon juga diutus untuk menghadang Pajajaran. Setelah Banten berhasil dikuasai, satu tahun kemudian Fatahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kalapa dan ditunjuk menjadi Bupati disana. Ketika rombongan kapal Portugis hendak menuju Sunda Kalapa, pasukan Islam yang telah menguasai wilayah Sunda Kalapa berhasil menghalau kedatangan Portugis dan orang-orang Portugis memutuskan untuk tidak melanjutkan peperangan dan kembali pulang ke Malaka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Muhlis. 2020. *Huru-Hara Majapahit dan Berdirinya Kerajaan Islam di Jawa*. Cet I. Yogyakarta: Araska.
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Cet I. Tangerang Selatan: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Adrisianti, Inajati, dkk. 2022. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia; Khasanah Budaya Bendawi*. Cetakan pertama. Jakarta: Balai Pustaka.
- Danasasmita, Saleh. 2014. *Mencari Gerbang Pakuan*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Ekadjati, Edi S. 2014. *Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran*. Cet II. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- El-Jaquene, Fery Taufiq. 2020. *Hitam Putih Pajajaran; dari Kejayaan hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran*. Cet I. Yogyakarta: Araska.
- Graaf, H.J. De dan TH. Pigeaud. 2003. *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa; Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Hadi, Abdul, dkk. 2022. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia; Akar Historis dan Awal*. Cetakan pertama. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamid, Abdul Rahman dan Muhammad Saleh Madjid. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hayati, Chusnul, dkk. 2000. *Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara Pada Abad XVI*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Laksono, Anton Dwi. 2018. *Apa Itu Sejarah; Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian*. Pontianak: Derwati Press.
- Lubis, Nina H. 2003. *Banten dalam Pergumulan Sejarah; Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah; Sebuah Pengantar*. Cet II. Depok: Prenadamedia Group.
- Muljana, Slamet. 2005. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Cet I. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.

- Mulyanto, Heru. 2023. *Epigrafi Sebagai Garda Terdepan Peradaban Nusantara "Kontribusi Epigrafi Kolonial Sebagai Penyedia Sumber Sejarah: Studi Kasus Makam VOC, Tugu Chastelein, dan Prasasti Padrao"*. Magelang: Taksaka Publisher.
- Padiatra, Aditia Muara. 2020. *Ilmu Sejarah; Metode dan Praktik*. Gresik: JSI Press.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2019. *Sejarah Nasional Indonesia II Zaman Kuno*. Cet VII. Edisi pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmat, Saefur. 2009. *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu sosial*. Cet I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunandar, Muhammad Nandang. 2021. *Pengantar Historiografi*. Cet I, Serang: Media Madani.
- Widiatmoko, Bayu. 2015. *Kronik Peralihan Nusantara Liga Raja-Raja Hingga Kolonial*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Zakaria, Mumuh Muhsin. 2011. *Priangan; dalam Arus Dinamika Sejarah*. Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat Press.

Artikel dalam Jurnal:

- Adlini, Miza Nina, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka". *Jurnal Edumapsul*, Vol. 6. No. 1 (2022).
- Setiadi, Rali. "Perancangan Multimedia Interaktif Kejayaan Kerajaan Pakuan Pajajaran". *Jurnal Sketsa*, Vol. 2. No. 1 (2015).
- Zakaria, Mumuh Muhsin dan Miftahull Falah, "Prabu Siliwangi Between History and Myth". *Paramita: Historical Studies Journal*. Vol. 31. No. 1 (2021).

Buku Terjemahan:

- Danasasmita, Saleh. 2015. *Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi*. Diterjemahkan oleh Purwanto. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Graaf, H.J. De dan TH. Pigeaud. 2003. *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa; Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Guillot, Claude. 2008. *Banten; Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. Cet I. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Skripsi, Makalah, Seminar:

- Syafiq, Alvia. "Aliansi Pertahanan Taiwan-Amerika Serikat dalam Menghadapi One China Policy Periode 2011-2014". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Zakaria, Mumuh Muhsin, "Eksistensi Kerajaan Pajajaran Dan Prabu Siliwangi". Makalah disampaikan dalam Seminar Prodi Ilmu Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Padjajaran Jatinangor. Pada 28 Maret 2011.